

Empat Kandidat Sekda Bombana Jalani Uji Kompetensi

Kendari, sultranet.com - Empat kandidat calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana resmi menjalani tahapan asesmen dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), sebagai proses penentu untuk mengisi posisi Jendral Aparatur Sipil Negara di wilayah penghasil emas itu, bertempat di Hotel Qubah 9, Selasa (14/4/2026).

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam rangka menilai kompetensi para peserta secara menyeluruh, mulai dari kemampuan manajerial, teknis, hingga aspek kepemimpinan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan.

Kepala BKPSDM Bombana, Abdul Muslikh, mengatakan bahwa seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menjaring figur terbaik yang mampu menjalankan peran strategis sebagai Sekda.

“Proses seleksi Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Bombana dilaksanakan secara profesional dan transparan,” ujar Muslikh.

Ia menjelaskan, asesmen dilaksanakan selama dua hari, yakni 14 hingga 15 April 2026, dengan rangkaian kegiatan yang terstruktur dan komprehensif. Pada hari pertama, peserta mengikuti registrasi, pembukaan serta pengarahan dari ketua tim penilai, kemudian dilanjutkan dengan simulasi analisis kasus.

Selanjutnya, peserta menjalani simulasi in-tray untuk menguji kemampuan dalam menangani berbagai persoalan administratif dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Setelah jeda istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi leaderless group discussion (LGD) guna menilai kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta kepemimpinan tanpa struktur formal.



Foto bersama Panitia

Hari pertama asesmen ditutup dengan wawancara berbasis kompetensi yang bertujuan menggali lebih dalam pengalaman, integritas, serta kesiapan peserta dalam mengemban tugas sebagai Sekda.

Pada hari kedua, peserta kembali mengikuti registrasi sebelum menjalani psikotes untuk mengukur aspek kepribadian, kecerdasan, dan stabilitas emosi. Rangkaian asesmen kemudian diakhiri dengan sesi monitoring dan evaluasi.

Empat peserta yang mengikuti tahapan ini merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, yakni Drs. Hasdin Ratta, M.Si, Darwin, SE, Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P, dan Ir. Syahrin, ST., M.P.W.K. Keempatnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak sebelumnya.

Menurut Muslikh, tahapan asesmen menjadi salah satu penentu utama dalam proses seleksi karena memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas dan kesiapan peserta.

“Semoga Sekretaris Daerah yang dinyatakan lulus pada seleksi ini dapat menjadi motor penggerak birokrasi, menjaga stabilitas kebijakan pemerintahan, serta menjadi jembatan yang baik dengan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bombana,” katanya.

Ia menambahkan, seleksi terbuka ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan serta memastikan sinkronisasi kebijakan antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. (IS)

Pewarta : Tasya

Yudi Utama Arsyad Desak Pemda Bombana Segera Gaji PPPK PW, Sebut Kondisi Darurat 2.000 Tenaga Belum Dibayar

Bombana, sultranet.com - Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana untuk segera mengalokasikan anggaran penggajian bagi sekitar 2.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi paruh waktu (PW) yang hingga kini belum menerima hak mereka, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama DPRD Bombana, Senin (13/4/2026).

Dalam forum resmi tersebut, Yudi yang akrab disapa Bintang Parlemen itu menyuarakan tuntutan secara tegas di hadapan jajaran pemerintah daerah. Ia

menilai persoalan keterlambatan gaji PPPK PW bukan sekadar isu administratif, melainkan sudah masuk kategori darurat karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan tenaga kerja dan keluarganya.

“Kita bicara soal lebih dari 2.000 orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Ini bukan hal sepele, ini darurat. Mereka sudah bekerja sejak dilantik, tetapi hingga hari ini belum menerima gaji, bahkan kontrak kerja pun belum mereka pegang,” tegas Yudi dalam rapat tersebut.

Ia mengakui kondisi keuangan daerah mungkin menjadi tantangan, namun menurutnya hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar para tenaga PPPK PW. Apalagi, kata dia, peran mereka sangat vital dalam mendukung operasional organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Guru dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tapi haknya belum diberikan. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.



Rapat Pembahasan LKPJ Bombana Tahun 2025

Yudi juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib para PPPK PW selama dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Bombana. Ia menyebut perjuangan ini telah dimulai sejak awal, termasuk saat mendorong pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

“Saya sampaikan kepada seluruh PPPK PW, selama saya masih di DPRD, saya akan terus berada di barisan terdepan memperjuangkan hak-hak kalian,” katanya kepada wartawan.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana itu juga mengungkapkan bahwa perjuangan belum selesai. Ia meminta dukungan dari semua pihak, baik DPRD maupun pemerintah daerah, agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan solusi konkret.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya berharap pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD dapat memberikan atensi penuh. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi mengajak para PPPK PW untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menunjukkan dedikasi kepada daerah. Ia percaya bahwa kinerja yang baik akan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak.

“Saya minta tetap bekerja dengan baik, tunjukkan pengabdian terbaik untuk daerah. Kita perjuangkan bersama hak-hak kalian,” ucapnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Bupati Bombana, H. Burhanuddin, yang dinilai memiliki kepedulian terhadap nasib para PPPK PW. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya yakin Bupati sangat peduli dan sedang mencari jalan keluar. Kita semua berharap ada solusi cepat agar hak mereka segera terpenuhi,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Yudi menegaskan bahwa dirinya akan terus bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik, termasuk memastikan kesejahteraan tenaga PPPK di Bombana.

“Jangan ragu, saya akan selalu bersama rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” pungkasnya.

Pewarta: Azuli

Dukungan Bupati H. Burhanuddin Antar BPR Bahteramas Raih 3 Penghargaan TOP BUMD 2026

Jakarta, sultranet.com - PT BPR Bahteramas sukses menorehkan prestasi nasional dengan meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Top BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tiga penghargaan tersebut meliputi TOP BUMD Bintang 4 untuk kinerja perusahaan, Top CEO BUMD 2026 yang diraih Direktur Utama Yusrianti Mansur, serta TOP Pembina BUMD 2026 yang diberikan kepada Bupati Bombana Burhanuddin dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

Capaian ini menegaskan keberhasilan BPR Bahteramas Bombana dalam menjaga kinerja bisnis, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bombana, dinilai menjadi faktor penting di balik keberhasilan tersebut.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD dalam membangun sistem yang profesional dan berdaya saing.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BUMD kita mampu berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Pemerintah daerah akan terus mendukung agar kinerja PT BPR Bahteramas Bombana semakin optimal,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), peningkatan profesionalisme, serta inovasi berkelanjutan akan terus didorong agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, turut mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid antara BUMD dan pemerintah daerah.

“Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, tetapi bukti kerja nyata BUMD di Sulawesi Tenggara yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT BPR Bahteramas, Dr. Sofyan, menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kinerja bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Direktur Utama Yusrianti Mansur juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara manajemen perusahaan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, transformasi dan inovasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang terus berkembang.

“Ajang TOP BUMD Awards merupakan salah satu corporate rating terbesar dan paling bergengsi di Indonesia dalam menilai kinerja BUMD,” kata Yusrianti.

Ajang ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business yang diterbitkan oleh PT Madani Solusi Internasional, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah serta sejumlah lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Penilaian penghargaan dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi bisnis, dan konsultan profesional dengan mempertimbangkan tiga indikator utama, yakni achievement (prestasi), improvement (perbaikan), dan contribution (kontribusi) terhadap bisnis, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi daerah.

Penghargaan TOP Pembina BUMD sendiri diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki peran strategis dalam membina dan mendorong peningkatan kinerja BUMD hingga mencapai predikat terbaik. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMD tidak terlepas dari dukungan kebijakan dan pembinaan pemerintah daerah.

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan BUMD diharapkan menjadi pemain utama dalam perekonomian daerah sekaligus penyedia layanan publik.

“BUMD harus menjadi kebanggaan daerah dan bangsa,” ujar Lutfi

Ia menjelaskan, untuk meraih penghargaan tersebut, setiap BUMD harus melalui proses penilaian oleh dewan juri yang mencakup pengisian kuesioner, wawancara, hingga sidang pleno.

Pada tahun ini, sebanyak 248 BUMD dan BLUD mengikuti ajang tersebut, meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun 2025. Dari jumlah itu, 218 BUMD dinyatakan mengikuti seluruh tahapan penilaian secara lengkap.

Menurut Lutfi, kegiatan ini tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran melalui pemberian masukan dari dewan juri kepada peserta.

“Peserta mendapatkan rekomendasi langsung sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja ke depan,” katanya.

Top BUMD Awards yang telah digelar sejak 2016 ini juga disebut sebagai bagian dari upaya mendorong BUMD agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Pewarta: Hardyawan

Yuri-Ruksamin Nahkodai DPP PBB, Yudi Utama Arsyad: Energi Baru untuk Lompatan Besar Partai

Bombana, sultranet.com - Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Yudi Utama Arsyad atau YUA, menyambut optimistis kepemimpinan baru partai di tingkat pusat di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, yang ditetapkan melalui Sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Rabu (11/3/2026).

YUA yang juga anggota DPRD Bombana menilai, duet Yuri-Ruksamin menghadirkan energi baru yang diyakini mampu mendorong percepatan kerja organisasi secara menyeluruh. Menurutnya, kepemimpinan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat daerah.

“Di bawah komando beliau, kami yakin roda organisasi akan bergerak dengan kecepatan maksimal. Ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi awal dari lompatan besar Partai Bulan Bintang,” ujar YUA. Sabtu (11/4)

Penunjukan Yuri Kemal Fadlullah, yang merupakan putra Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra, menandai babak baru dalam perjalanan PBB. Ia dipercaya memimpin hingga Muktamar VII pada 2030. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa PBB tetap konsisten dengan mekanisme internal tanpa melalui Muktamar Luar Biasa.

Sementara itu, kehadiran Ruksamin sebagai Sekjen dinilai menjadi kekuatan tersendiri bagi partai. Dua periode menjabat sebagai Bupati Konawe Utara serta pengalaman memimpin DPW PBB Sulawesi Tenggara menjadikannya figur dengan rekam jejak organisasi yang solid. Pada pemilu sebelumnya, ia berhasil mengantarkan PBB meraih empat kursi DPRD Provinsi dan menjadikan partai sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Konawe Utara.

YUA menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa PBB memiliki fondasi kuat untuk berkembang lebih besar. Ia menyebut pengalaman dan

kapasitas kedua pemimpin tersebut sebagai kombinasi ideal untuk memperkuat posisi partai, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kami di tingkat DPC tentu akan mendukung penuh dengan segala upaya untuk membesarkan partai ini. Konsolidasi akan kami perkuat hingga ke tingkat bawah, karena kekuatan partai sesungguhnya ada pada kerja kolektif kader di daerah,” tegas pria yang akrab disapa Bintang Parlemen itu.

Lebih jauh, YUA mengungkapkan harapannya agar PBB mampu tampil lebih kompetitif pada pemilu mendatang. Ia menekankan pentingnya soliditas internal, kerja nyata, dan kedekatan dengan masyarakat sebagai kunci utama meraih kepercayaan publik.

“Kami berharap PBB semakin besar di pemilu yang akan datang. Kader harus solid, kerja nyata harus ditunjukkan, dan kepercayaan masyarakat harus terus dijaga. Dengan kepemimpinan Yuri-Ruksamin, kami optimistis itu bisa terwujud,” ucapnya.

Menurut YUA, momentum pergantian kepemimpinan ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk mempercepat gerak partai. Ia mengajak seluruh kader dan simpatisan menjadikan semangat baru ini sebagai bahan bakar untuk memperkuat posisi PBB di berbagai daerah, termasuk di Bombana.

Dengan struktur kepemimpinan yang dinilai solid dan berpengalaman, PBB kini menghadapi fase penting dalam membangun kembali kekuatan politiknya. Konsolidasi yang terarah, strategi yang matang, serta kepemimpinan yang adaptif diyakini akan menjadi faktor penentu dalam menghadapi dinamika politik menuju pemilu mendatang.

Pewartu : Aldi.L

Ombudsman RI Tinjau Pelayanan Publik di Puskesmas Rumbia, Dinkes Bombana Komitmen Perkuat Standar Layanan Kesehatan

Bombana, Sultranet.com - Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik yang baik, yang berlangsung di Puskesmas Rumbia, Rabu, 8 April 2026.

Kunjungan itu turut didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., bersama Kepala Bidang Pelayanan dan SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Tarzan, SKM., M.Sc.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman RI melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas Rumbia. Pemeriksaan dilakukan mulai dari alur pelayanan pasien, sistem administrasi pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh tenaga kesehatan di lapangan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas, tim Ombudsman juga menggelar dialog interaktif bersama tenaga kesehatan guna menggali informasi terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi petugas, serta praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, mengatakan kunjungan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Menurut Fatmiati, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Ombudsman merupakan bentuk sinergi positif antara lembaga pengawas pelayanan publik dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan sesuai standar.

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berupaya memperkuat standar pelayanan kesehatan melalui pembinaan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana, hingga penguatan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Fatmiati menambahkan, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang memadai, tetapi juga oleh sikap profesional, kedisiplinan, dan komitmen tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dengan humanis.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman, mudah diakses, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, dialog antara tim Ombudsman dan tenaga kesehatan berlangsung aktif dan terbuka. Sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan berbagai pengalaman di lapangan, termasuk tantangan dalam pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan peningkatan fasilitas pendukung, serta upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Ombudsman RI menilai pengawasan secara berkala penting dilakukan agar pelayanan publik di sektor kesehatan terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai mampu memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Pemerintah daerah berharap sinergi antara Ombudsman dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terus terjalin dalam mendorong budaya pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kunjungan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah, khususnya di tingkat puskesmas.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan profesionalitas, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya. (adv)

Rapimnas Mei 2026: PJS Rapatkan Barisan, Menjemput Momentum Menuju Konstituen Dewan Pers

JAKARTA, sultranet.com - Di tengah dinamika dunia pers yang terus bergerak cepat, langkah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menuju pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers memasuki fase krusial. Tidak lagi sekadar wacana, upaya itu kini memasuki tahap konsolidasi nasional yang terukur dan sistematis.

Pada Selasa, 12 Mei 2026 mendatang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta. Forum ini bukan hanya ajang pertemuan rutin, melainkan ruang strategis yang akan mempertemukan energi seluruh pimpinan daerah dalam satu arah: memastikan kesiapan organisasi menuju pendaftaran resmi sebagai konstituen Dewan Pers.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyebut Rapimnas kali ini sebagai titik penentu.

“Ini bukan sekadar rapat biasa. Ini momentum untuk memastikan bahwa seluruh

langkah kita menuju Dewan Pers berjalan sesuai rencana dan terukur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Atmosfer Rapimnas diproyeksikan akan sarat dengan evaluasi, refleksi, sekaligus penajaman strategi. Dari Sabang hingga Merauke, para pimpinan DPD akan datang membawa data, persoalan, dan harapan dari daerah masing-masing.

Salah satu fokus utama adalah evaluasi tahap pertama persiapan pendaftaran ke Dewan Pers. Setiap DPD diminta memaparkan perkembangan pengumpulan data anggota sebuah proses yang menjadi fondasi administratif sekaligus indikator keseriusan organisasi.

Bagi PJS, data bukan sekadar angka. Di dalamnya tersimpan legitimasi, representasi, dan kekuatan kolektif yang akan diuji dalam proses verifikasi Dewan Pers, baik secara administratif maupun faktual.

“Kami ingin mendengar langsung dari daerah. Apa yang sudah dicapai, apa kendalanya, dan bagaimana solusi ke depan. Semua harus jelas dan terukur,” kata Mahmud.

Selain itu, Rapimnas juga akan menjadi ruang pematangan menuju Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Munas tersebut bukan hanya agenda organisasi, tetapi juga momentum simbolik yang beririsan dengan target besar PJS: mendaftarkan diri sebagai konstituen Dewan Pers.

Di titik ini, PJS tidak hanya berbicara tentang struktur, tetapi juga tentang kesiapan infrastruktur organisasi di daerah. Karena itu, agenda penentuan wilayah target verifikasi menjadi krusial. Tidak semua daerah akan langsung diajukan hanya yang benar-benar siap secara administrasi, kantor, dan operasional.

“Verifikasi faktual adalah tahap yang sangat menentukan. Kita harus pastikan daerah yang ditunjuk benar-benar siap,” tegas Mahmud.

Di sela agenda yang padat, nuansa reflektif juga akan hadir melalui peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 PJS. Empat tahun perjalanan menjadi ruang evaluasi sekaligus pijakan menuju fase yang lebih matang.

Tema yang diusung tahun ini “Meneguhkan Integritas dan Kompetensi Wartawan

untuk PJS yang Lebih Mandiri, Profesional dan Diakui” mencerminkan arah perjuangan organisasi: tidak hanya diakui secara struktural, tetapi juga dihormati secara profesional.

“Empat tahun bukan waktu yang singkat. Kita sudah melewati banyak proses. Di tahun kelima ini, kita harus membuktikan bahwa PJS layak menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers,” ujar Mahmud dengan optimisme.

Langkah strategis lainnya yang akan mewarnai Rapimnas adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan dua lembaga penting, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW).

Kerja sama dengan BAZNAS membuka peluang penguatan kesejahteraan anggota, sementara kolaborasi dengan LUKW menjadi pintu untuk memperluas akses Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebuah elemen penting dalam meningkatkan profesionalisme.

“BAZNAS untuk kesejahteraan, LUKW untuk kompetensi. Ini dua pilar penting untuk membangun wartawan yang profesional dan sejahtera,” jelas Mahmud.

Namun, di balik semua agenda strategis tersebut, satu hal yang paling ditekankan adalah kekompakan. Mahmud secara tegas meminta seluruh pimpinan DPD untuk hadir langsung dalam Rapimnas.

“Kehadiran pimpinan daerah sangat penting. Ini menyangkut masa depan organisasi. Saya harap tidak ada yang absen tanpa alasan mendesak,” ujarnya.

Para peserta pun diminta datang dengan persiapan matang mulai dari laporan perkembangan anggota, daftar kendala di daerah, hingga kesiapan kantor untuk verifikasi faktual.

Semua itu bermuara pada satu target besar: menjadikan PJS sebagai konstituen Dewan Pers pada 2026. Jika tercapai, langkah ini bukan hanya capaian administratif, tetapi juga tonggak sejarah bagi organisasi wartawan media siber di Indonesia.

Sebuah perjalanan yang tidak ringan, namun bukan mustahil.

“Ini perjuangan bersama. Dari pusat hingga daerah, dari barat sampai timur

Indonesia. Dengan kerja keras dan solidaritas, saya yakin kita bisa mencapainya,” tutup Mahmud. (PJS)

Pewarta : rustam

Jangan PHK Guru PPPK Paruh Waktu, Kemendikdasmen Buka Keran BOSP untuk Talangi Gaji

JAKARTA, sultranet.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan pemerintah daerah (pemda) dilarang memberhentikan guru dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW).

Penegasan itu disertai kebijakan relaksasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu pembayaran gaji, terutama bagi daerah yang mengalami keterbatasan fiskal.

“Guru-guru PPPK dan PPPK paruh waktu tidak boleh diberhentikan. Sudah jelas aturannya,” tegas Mu'ti usai mencanangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Rawamangun, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia meminta kontrak kerja PPPK paruh waktu tetap dipertahankan setidaknya hingga akhir 2026. Selama masa tersebut, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen siap memberikan dukungan pendanaan sebagai solusi sementara atas kendala anggaran di daerah.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar honor

guru, tenaga tata usaha, dan tendik non-ASN yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada 2026.

Dalam aturan tersebut, penggunaan dana BOSP dibatasi maksimal 20 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen untuk sekolah swasta. Relaksasi ini juga disertai sejumlah persyaratan.

Pemda wajib mengajukan permohonan resmi kepada Kemendikdasmen dengan melampirkan kondisi fiskal daerah serta rencana penguatan anggaran melalui APBD. Selain itu, kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Adapun penerima manfaat merupakan guru dan tendik yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.

Mu'ti menegaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di daerah tetap berjalan, sekaligus menjaga kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sebagai garda terdepan pendidikan nasional. (PJS)

Pewarta: Hardyawan

Kemendikdasmen Gandeng 113 LPTK, 17.930 Guru Difasilitasi Kuliah S-1/D-IV pada 2026

JAKARTA, sultranet.com - Pemerintah kembali menggenjot peningkatan kualifikasi akademik guru melalui program strategis nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng 113 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk memfasilitasi 17.930 guru melanjutkan pendidikan S-1/D-IV pada 2026.

Program yang dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan,

dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) ini menasar guru dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK yang belum memenuhi kualifikasi sarjana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa peningkatan kualifikasi akademik merupakan kunci dalam mendorong mutu pendidikan nasional. Menurutnya, kualitas guru sangat menentukan kualitas pendidikan suatu bangsa.

“Program ini tidak hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Tidak hanya kualifikasi yang terpenuhi, tetapi juga peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran di kelas,” ujar Nunuk di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia menambahkan, guru yang telah menyelesaikan pendidikan S-1/D-IV nantinya berpeluang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu, yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh tunjangan profesi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan oleh Direktur Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal, Direktur Guru Pendidikan Dasar, serta Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bersama pimpinan LPTK mitra.

Dari pihak perguruan tinggi, Rektor Universitas Terbuka, Ali Muktiyanto, menyatakan kesiapan LPTK dalam mendukung program ini melalui sistem pembelajaran yang fleksibel.

“Kami merancang sistem pembelajaran yang memungkinkan guru tetap mengajar sambil meningkatkan kualifikasi akademiknya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas PGRI Jombang, Munawaroh. Ia menilai program ini menjadi solusi bagi guru yang selama ini terkendala melanjutkan pendidikan.

“Kami siap menyiapkan dosen, infrastruktur, serta sistem pembelajaran yang mendukung agar program ini berjalan optimal,” katanya.

Program ini menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengalaman mengajar diakui sebagai bagian dari capaian

pembelajaran guna mempercepat masa studi.

Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan maksimal Rp3 juta per orang setiap semester yang mencakup biaya kuliah dan ujian. Kemendikdasmen menegaskan tidak ada pungutan biaya tambahan yang dibebankan kepada peserta program.

Melalui program ini, pemerintah berharap kualitas layanan pendidikan semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, serta berdaya saing. (Rls-PJS)

Tambang Emas Ilegal di Bombana Telan Korban, 1 Tewas, 1 Kritis, 1 Luka Berat, 1 Masih Tertimbun

BOMBANA, sultranet.com - Kecelakaan tragis terjadi di lokasi penambangan emas ilegal di wilayah SP 9, Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (6/4/2026).

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, satu orang dalam kondisi kritis, satu orang mengalami luka berat, dan satu korban lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian setelah tertimbun material longsor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula sekitar pukul 15.00 WITA, saat para korban bersama sejumlah warga lainnya berbondong-bondong masuk ke dalam lubang galian untuk melakukan aktivitas pencarian emas secara manual menggunakan skop dan wajan.

Sekitar pukul 17.00 WITA, tanah di pinggiran lubang tiba-tiba longsor dan menimbun beberapa orang yang berada di dalam galian. Kondisi tersebut memicu kepanikan di lokasi kejadian.

Selang 30 menit kemudian, sekitar pukul 17.30 WITA, masyarakat yang berada di

sekitar lokasi langsung berupaya melakukan penggalian secara manual untuk mengevakuasi para korban yang tertimbun tanah.

Upaya evakuasi dilakukan dengan peralatan seadanya oleh warga dan keluarga korban. Proses pencarian berlangsung hingga malam hari dalam kondisi terbatas.

Sekitar pukul 23.00 WITA, salah satu korban berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan langsung dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ada korban yang belum ditemukan dan diduga masih berada di dalam timbunan material longsor.

“Evakuasi masih terus dilakukan, masih ada korban yang belum ditemukan,” ujarnya.

Adapun identitas Inisial para korban dalam peristiwa tersebut yakni Er (46), warga Desa Wesalo, Kecamatan Lolae, Kabupaten Kolaka Timur, yang saat ini dalam kondisi kritis.

Kemudian Ka (50), warga Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dinyatakan meninggal dunia.

Selanjutnya Bu (52), warga Desa Lakomato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, mengalami luka berat berupa patah tulang kaki.

Sementara itu, satu korban lainnya Hu (42), warga Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, hingga kini masih belum ditemukan.

Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko aktivitas penambangan emas ilegal yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Minimnya pengamanan serta penggunaan metode tradisional membuat para penambang sangat rentan terhadap kecelakaan fatal.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait langkah penanganan lebih lanjut maupun proses pencarian korban yang masih tertimbun.

Pemkab Bombana Perkuat Pengawasan Perusahaan, Fokus Ketenagakerjaan dan Pertambangan

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, dengan menitikberatkan pada aspek ketenagakerjaan, perizinan, dan pengawasan lapangan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Syahrin, serta dihadiri para asisten dan kepala perangkat daerah terkait, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai regulasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah menilai pengawasan yang terintegrasi dan aktif sangat diperlukan, terutama terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan.

Dalam pembahasan, aspek ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk memastikan mekanisme rekrutmen yang transparan dan adil. Selain itu, perusahaan juga diingatkan untuk memenuhi seluruh kewajiban terhadap tenaga kerja, mulai dari hak normatif hingga perlindungan kerja.

Di sisi perizinan, pemerintah menyoroti masih perlunya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Setiap aktivitas usaha diharapkan berjalan sesuai dengan izin yang dimiliki, guna menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat.

Sementara itu, pada aspek pengawasan, rapat menegaskan perlunya pendekatan yang lebih aktif dan komprehensif. Pemerintah daerah mendorong agar

pengawasan tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan oleh tim terkait.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menegaskan pentingnya pendataan dan identifikasi aktivitas perusahaan, khususnya di sektor pertambangan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memetakan potensi yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita perlu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas pertambangan yang masih berproduksi, termasuk yang sudah memiliki RKB maupun yang belum, supaya bisa dilihat potensi yang bisa memberi nilai tambah bagi daerah. Misalnya dari sektor perhubungan, kita bisa melihat potensi dari penggunaan kendaraan operasional maupun alat berat,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar pengawasan di lapangan dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada laporan yang diterima. Menurutnya, pendekatan proaktif sangat penting untuk memastikan tidak ada aktivitas yang luput dari pengawasan.

“Saat turun ke lapangan, jangan hanya terpaku pada satu laporan. Kalau ada hal lain yang ditemukan, itu juga harus jadi perhatian. Jadi pengawasan harus lebih luas dan proaktif, tidak hanya menunggu aduan masyarakat,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dalam pengawasan perusahaan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan perusahaan, tetapi juga mampu mendorong optimalisasi kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang evaluasi berkelanjutan guna memastikan kebijakan pengawasan berjalan efektif. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan terukur, aktivitas perusahaan di Bombana diharapkan dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan hukum, serta kepentingan masyarakat luas.

Pewarta : Tasya